

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dalam rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan, MA dan KY memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan diklat hakim. Kewenangan MA untuk menyelenggarakan diklat bersumber dari kewenangan mengatur sendiri organisasi yang diterjemahkan dalam pembentukan diklat. Kewenangan pelatihan hakim oleh KY sendiri bersumber dari kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diturunkan ke dalam tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Kemudian tugas penyelenggaraan peningkatan kapasitas hakim ini dituangkan ke dalam bentuk pelatihan hakim.

Penyelenggaraan diklat hakim oleh MA telah diatur dengan jelas, baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal MA. Secara garis besar, penyelenggaraan diklat hakim oleh MA telah sesuai dengan prinsip internasional mengenai independensi peradilan dimana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim seyogyanya dilaksanakan di bawah kontrol yudisial sedangkan pengaturan pelatihan hakim oleh KY dalam meningkatkan kapasitas hakim lewat pelatihan hakim diatur dengan luas dan abstrak. Undang-undang KY tidak memberikan penjelasan terhadap frasa “kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim” yang menjadi dimensi utama dalam setiap pelatihan hakim yang diselenggarakan KY. Dengan ketiadaan rumusan jelas mengenai batasan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta tidak adanya pedoman teknis KY dalam menyelenggarakan pelatihan hakim membuat pengaturan kewenangan tersebut tidak jelas dan tidak

terbatas. Dari segi kelembagaan, SSR merupakan contoh baik kelembagaan penyelenggaraan diklat hakim yang dapat dicontoh dan diadopsi oleh Indonesia.

Dalam penyelenggaraan diklat hakim, MA memiliki pedoman teknis berupa SK KMA Nomor 140 Tahun 2008 yang mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan diklat hakim sedangkan KY tidak memiliki pedoman teknis KY dalam menyelenggarakan pelatihan hakim. Ini membuat penyelenggaraan pelatihan hakim oleh KY berdasar kebiasaan tanpa disertai parameter yang membuat penyelenggaraan pelatihan hakim terus menjadi sulit terukur.

Penyelenggaraan diklat hakim merupakan bentuk dari pengembangan kapasitas hakim. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* maupun *Basic Principle on the Independence of the Judiciary* menyatakan bahwa aspek pelatihan hakim menjadi salah satu pilar dalam membangun independensi peradilan. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menyatakan bahwa hakim harus mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadinya guna melaksanakan tugas kehakiman dengan baik.<sup>194</sup> Salah satu bentuk perwujudan prinsip tersebut adalah dengan penyelenggaraan diklat hakim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diklat hakim yang dilakukan oleh MA dan KY memiliki kontribusi kepada individu peserta diklat hakim.

Implementasi penyelenggaraan diklat hakim saat ini belum cukup memenuhi tujuan dan capaian diklat hakim itu sendiri. Implementasi penyelenggaraan diklat hakim di MA belum memenuhi tujuan penyelenggaraan diklat hakim itu sendiri. Hal ini disebabkan materi pengajaran bersifat “kering”, tidak disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Akibatnya proses penyegaran penemuan hukum itu tidak terjadi sehingga pertimbangan hukum yang menarik, sistematis, dan logis itu

---

<sup>194</sup> *Id.*, value 6.3.

juga sulit tercapai. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan diklat hakim oleh MA diperlukan jenis pelatihan hakim dengan benar-benar mempertimbangkan perkembangan hukum sebagai bahan ajar. Aspek pembaharuan terhadap bahan ajar menjadi aspek fundamental dalam mengembangkan kompetensi hakim. Kemudian untuk penyelenggaraan diklat hakim di KY, dalam mencapai diklat yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH, tidak cukup dengan melakukan pelatihan hakim berdimensi KEPPH. Meskipun demikian penentuan studi kasus yang merujuk pada tren laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH sudah menjadi langkah yang baik. Meskipun belum ada kajian evaluasi yang memperlihatkan koneksi antara sertifikasi hakim dengan kualitas putusan, namun implementasi kewenangan diklat hakim yang didukung dengan data wawancara menunjukkan adanya pengembangan kapasitas bagi individu hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diklat hakim memberikan kontribusi terhadap pengembangan kapasitas hakim tapi belum cukup mampu untuk meningkatkan kualitas putusan hakim.

## **4.2 Saran**

Mengacu pada analisis di atas, saya merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tataran peraturan, khususnya menyangkut kewenangan KY dalam menyelenggarakan diklat, perlu ada penjelasan terhadap frasa “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” mengingat penyelenggaraan tugas peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan merujuk pada batasan tersebut. Meskipun pelatihan KEPPH dan teknis yudisial beririsan, tetap dibutuhkan penjelasan dan pembatasan penyelenggaraan

pelatihan hakim apa saja yang dapat dilaksanakan oleh KY dapat menghindari ketidakefektifan pelatihan..

2. KY memerlukan adanya suatu kebijakan internal yang berisi grand design peningkatan kapasitas hakim karena rujukan saat ini sudah daluwarsa dan tidak cukup layak lagi untuk tetap dijadikan pedoman. Grand design ini berisi kebutuhan dan perencanaan jangka panjang KY dalam menyelenggarakan diklat sehingga penyelenggaraan diklat tidak berdasarkan pada kebijakan anggaran Bappenas semata.
3. Perlu koordinasi dan kolaborasi MA dan KY dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelatihan agar pelatihan berjalan efektif.
4. Penyatuan atap kelembagaan diklat hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan catatan MA tetap membuka peluang kerja sama diklat hakim dengan kementerian/lembaga serta institusi dan organisasi lain.
5. Pada tataran implementasi, Pusdiklat Teknis Peradilan dapat melakukan kerja sama dengan Puslitbang MA dengan membangun koneksitas dalam melaksanakan tugas penelitian dalam pelaksanaan diklat hakim. Contoh ketika ada permasalahan dalam eksekusi lingkungan hidup yang tidak jalan, baik karena putusan pengadilan yang tidak berkualitas atau justru materi kurikulum pelatihan sertifikasi hakim lingkungan yang salah, Puslitbang perlu melakukan penelitian yang berfungsi melaksanakan perencanaan dan evaluasi diklat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Jurnal

- A., Ady Thea D. "Layak Diapresiasi, 8 Putusan Ini Berdampak Positif Terhadap Lingkungan Hidup." *hukumonline.com*. 4 Februari 2022. Diakses pada 10 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/layak-diapresiasi--8-putusan-ini-berdampak-positif-terhadap-lingkungan-hidup-lt61fcfa7d6d2ec/>.
- Australian Law Reform Commission. *The Role Judicial Education, Training, and Accountability in Shaping Legal Culture and Practice*. Diakses pada 8 Maret 2023. <http://www.austlii.edu.au/other/alrc/publications/reports/89/ch2.html>.
- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Alumni Pusdiklat Teknis." <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/1480>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Risalah Pembahasan Pembentukan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial." Arsip Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/387>.
- Kadafi, Binziad. "Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hakim." *Jurnal Hukum Jentera*. Edisi IV. (2003). ISBN 1412-6842.
- Ginting, Miko Susanto. "Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego." *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. (2019). Diakses 8 Maret 2023. DOI: <https://leip.or.id/jurnal-dictum-kajian-putusan-penting/>.
- Indriati Amarini. "Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia*

*Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 25. Issue 1. (2018).

Diakses pada 11 Maret 2023. DOI: [10.20885/iustum.vol25.iss1.art9](https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9).

Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim.”

Majalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2019).

<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Majalah-KY-Juli-September-2019.pdf>.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan. “Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Youtube Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan. (2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=WznhIzxWC5w>.

Riyadi, Eko. “Human Rights Judicial Methodology: A Map on Indonesian Practices.”

Laporan Penelitian Pusham Universitas Islam Indonesia. (2020).

Rositawati, Dian. “Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System.” Tilburg University. (2019). DOI:

[https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati\\_Judicial\\_16\\_12\\_2019.pdf](https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati_Judicial_16_12_2019.pdf).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. “Membumikan Instrumen HAM Lewat Proses Peradilan.” Laporan Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2021).

## **Buku**

Astriyani, Nur Syarifah, Liza Farihah, Muhammad Tanziel Aziezi, Muhammad Amin Putra. *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2016.

- Faiz, Elsa. Muhammad Muslih. Sahlul. Ikhsan Azhar. Zaid Mushafi. Abdul Razaq. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Kelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Greene, Edie dan Leslie Ellis. "Decisions Making in Criminal Justice". Dalam *Applying Psychology to Criminal Justice*. 2008. Diakses pada 8 Maret 2023. [10.1002/9780470713068.ch11](https://doi.org/10.1002/9780470713068.ch11).
- Guarnieri, Carlo, Patrizia Pederzoli. *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy (Oxford Socio Legal Studies)*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial. 2012.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Rencana Strategis Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2020.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Diklat Bersistem: Bahan Diklat Bagi Analisis Kebutuhan Diklat*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku III: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007*. Makassar. 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Dokumen Tidak Dipublikasikan. 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Catatan Kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Dokumen Tidak Dipublikasikan. 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2027*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Rangkuman Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dari Tahun 1951 s.d. 1994*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Strategi Pelaksanaan Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi Revisi Buku IV Kekuasaan Kehakiman: Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Munti, Ratna Batara. Emma Mukarramah. Maidina Rahmawati. *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: International Non Government Organisation Forum for Indonesian Development (INFID), 2022.

Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim dan Tenaga Peradilan*. 2004.

Rositawati, Dian. Jane Aileen Tedjaseputra. Muhammad Tanziel Aziezi. Raynov Tumorang Parmintori. Zainal Abidin. *Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan Hak Asasi Manusia Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2022. Diakses pada 8 Maret 2023. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/e-Book-Melindungi-Ekspresi-Analisis-Pidana-dan-HAM-atas-Putusan-Pengadilan-di-Indonesia.pdf>.

Transparency International Indonesia. *Laporan Global Corruption Barometer Asia 2020*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2020. Diakses pada 8 Maret 2023. [https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final\\_web.pdf](https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf).

### **Disertasi**

Rositawati, Dian. “Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System.” Disertasi, Tilburg University, 2019. DOI: [https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati\\_Judicial\\_16\\_12\\_2019.pdf](https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati_Judicial_16_12_2019.pdf).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  
Agung.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Umum.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan  
Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang  
Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang  
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-PR.07.10 Tahun  
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia.

### **Kebijakan Mahkamah Agung**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/I/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari Lingkungan Peradilan Di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Di Mahkamah Agung.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK/VII/2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pemanggilan Peserta Pelatihan Bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/BLD/SK/VI/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/BLD/SK/VI/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **Kebijakan Komisi Yudisial**

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

## **Perjanjian Internasional**

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*. 1985. value 10. Diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary#:~:text=The%20judiciary%20shall%20decide%20matters,quarter%20or%20for%20any%20reason.>

United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. 2018. Diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>.

## **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/Pid/2013/PT.Btn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

## Lainnya

Rositawati, Dian. Sistem Satu Atap. Dalam Perkuliahan Kekuasaan Kehakiman di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. 10 Maret 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kepala Badan Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim,” *bldk.mahkamahagung.go.id*. Diakses pada 22 Agustus 2023 melalui <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/450-ka-badan-membuka-pelatihan-sertifikasi-hakim.html>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seremonial Penutupan Proyek Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dengan *Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education* (NUFFIC). Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. 16 Maret 2023.

Wawancara dengan Hakim Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.. Hakim Yustisial pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 25 Juli 2023. Wawancara melalui *audio call* WhatsApp.

Wawancara dengan Hakim, Rizkiansyah, S.H., LL.M. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia. 31 Juli 2023. Wawancara langsung di Novotel Cikini Jakarta.

Wawancara dengan Hakim, Dwi Novita Purbasari, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 31 Juli 2023. Wawancara langsung di Novotel Cikini Jakarta.

Wawancara dengan Wiwiek Awiati, S.H., M.H.. Trainers dan Tim Penasihat Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 29 Juli 2023. Wawancara melalui *audio call* WhatsApp.

Wawancara dengan Lina Maryani, S.H., M.H. Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial. 31 Juli 2023. Wawancara melalui *audio call* WhatsApp.

Wawancara dengan Ikhsan Azhar. Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial. 16 Desember 2022. Wawancara melalui *audio call* Whatsapp.

Wawancara dengan Liza Farihah, S.H.. Direktur Eksekutif pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. 28 Juli 2023. Wawancara langsung di Kantor Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.

Wawancara dengan Muhammad Tanziel Aziezi, S.H.. Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. 10 Agustus 2023. Wawancara melalui *audio call* WhatsApp.

Wawancara dengan Antonius Adityanto Nugroho, S.H.. Peneliti pada *Indonesian Center for Environmental Law*. 10 Agustus 2023. Wawancara langsung di Grand Mercure Seminyak Bali.

Website Studiecentrum Rechtspleging melalui tautan <https://ssr.nl/>.